

PELAKSANAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR JENIS ANGKUTAN UMUM DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUMBAWA

Sri Nurhidayati¹, Samsun^{2*}, Muslim³

¹²³ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Samawa, Sumbawa, Indonesia

Penulis Korespondensi: samsun32@gmail.com

Article Info	Abstrak
Article History <i>Received: 30 November 2025</i> <i>Revised: 12 Desember 2025</i> <i>Published: 31 Desember 2025</i>	Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor jenis angkutan umum merupakan salah satu instrumen penting dalam menjamin keselamatan lalu lintas, kelayakan teknis kendaraan, serta perlindungan bagi pengguna jasa transportasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor jenis angkutan umum di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas pejabat dan petugas penguji kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa, serta pemilik dan pengemudi angkutan umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun dalam praktiknya masih ditemukan sejumlah kendala, seperti keterbatasan sarana dan prasarana pengujian, jumlah sumber daya manusia penguji yang belum optimal, serta tingkat kepatuhan pemilik kendaraan yang masih relatif rendah. Kondisi tersebut berdampak pada belum maksimalnya jaminan keselamatan dan kelayakan operasional angkutan umum. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kapasitas kelembagaan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, modernisasi peralatan pengujian, serta peningkatan pengawasan dan sosialisasi kepada pemilik kendaraan agar pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Keywords <i>Perhubungan;</i> <i>Pengujian Kendaraan</i> <i>Bermotor;</i> <i>Angkutan Umum;</i>	

PENDAHULUAN

Transportasi darat memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat serta aktivitas sosial dan ekonomi di daerah. Angkutan umum sebagai salah satu moda transportasi utama dituntut untuk memenuhi standar keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bagi pengguna jasa. Oleh karena itu, setiap kendaraan bermotor jenis angkutan umum wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengujian kendaraan bermotor menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa kendaraan yang beroperasi di jalan raya berada dalam kondisi layak dan aman digunakan.

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor merupakan kewenangan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi teknis di bidang transportasi. Pengujian kendaraan bermotor tidak hanya berorientasi pada pemenuhan aspek administratif, tetapi juga bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat kondisi kendaraan yang tidak memenuhi standar teknis. Dalam konteks ini, pengujian kendaraan bermotor jenis angkutan umum memiliki tingkat urgensi yang lebih tinggi karena berkaitan langsung dengan keselamatan penumpang dan kepentingan publik secara luas.

Di Kabupaten Sumbawa, pengujian kendaraan bermotor jenis angkutan umum telah dilaksanakan secara rutin oleh Dinas Perhubungan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai permasalahan, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana pengujian, kapasitas sumber daya manusia penguji, maupun tingkat kesadaran dan kepatuhan pemilik kendaraan terhadap kewajiban uji berkala. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dan berdampak pada kualitas pelayanan publik di bidang transportasi.

Selain itu, perkembangan jumlah kendaraan bermotor dan meningkatnya kebutuhan mobilitas masyarakat menuntut adanya sistem pengujian kendaraan bermotor yang profesional, transparan, dan akuntabel. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor yang belum optimal dapat menimbulkan berbagai implikasi, seperti menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah, meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas, serta tidak tercapainya tujuan penyelenggaraan transportasi yang aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai bagaimana pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor jenis angkutan umum di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor jenis angkutan umum di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan kajian administrasi publik di bidang transportasi, serta menjadi bahan masukan praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian yang berjudul Akuntabilitas Dalam Pelayanan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor jenis angkutan umum di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman terhadap proses, mekanisme, serta realitas pelaksanaan kebijakan di lapangan berdasarkan perspektif para pelaksana dan pengguna layanan.

Lokasi penelitian ditetapkan di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa, khususnya pada unit pelaksana pengujian kendaraan bermotor. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa merupakan instansi yang memiliki kewenangan langsung dalam penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor jenis angkutan umum di wilayah tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat struktural, petugas penguji kendaraan bermotor, serta pemilik dan pengemudi angkutan umum yang mengikuti proses pengujian. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, laporan

kegiatan pengujian kendaraan bermotor, arsip administrasi, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi terkait prosedur pelaksanaan pengujian, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas layanan. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pengujian kendaraan bermotor di lapangan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperkuat data hasil wawancara dan observasi.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik, dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan dan metode pengumpulan data. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang memadai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor jenis angkutan umum di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa pada prinsipnya telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang mengatur tentang standar teknis dan laik jalan kendaraan bermotor. Proses pengujian dilaksanakan melalui tahapan pemeriksaan administratif dan teknis kendaraan, yang meliputi pengecekan identitas kendaraan, sistem pengereman, sistem kemudi, lampu dan alat pemantul cahaya, emisi gas buang, serta komponen keselamatan lainnya. Pelaksanaan pengujian tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa kendaraan angkutan umum yang beroperasi telah memenuhi persyaratan keselamatan dan kelayakan teknis.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor masih belum sepenuhnya optimal. Salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut adalah keterbatasan sarana dan prasarana pengujian. Beberapa peralatan pengujian belum sepenuhnya mengikuti perkembangan teknologi kendaraan, sehingga berdampak pada akurasi dan kecepatan proses pengujian. Kondisi ini sejalan dengan temuan di lapangan yang menunjukkan bahwa keterbatasan fasilitas dapat menghambat kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik.

Selain faktor sarana dan prasarana, sumber daya manusia juga menjadi aspek penting dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor. Jumlah petugas penguji yang tersedia belum sepenuhnya sebanding dengan volume kendaraan angkutan umum yang wajib mengikuti uji berkala. Di samping itu, kebutuhan peningkatan kompetensi dan sertifikasi petugas penguji masih menjadi tantangan tersendiri. Keterbatasan sumber daya manusia ini berdampak pada lamanya waktu pelayanan dan beban kerja petugas, yang pada akhirnya mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.

Tingkat kesadaran dan kepatuhan pemilik kendaraan angkutan umum terhadap kewajiban pengujian berkala juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat pemilik kendaraan yang belum secara konsisten melakukan pengujian sesuai jadwal yang ditetapkan. Rendahnya kepatuhan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pengujian kendaraan bermotor, pertimbangan biaya, serta persepsi bahwa pengujian hanya bersifat administratif. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan sosialisasi dan pengawasan agar tujuan utama pengujian kendaraan bermotor, yaitu keselamatan dan keamanan transportasi, dapat tercapai secara optimal.

Dalam konteks administrasi publik, pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor merupakan bagian dari pelayanan publik yang menuntut prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, upaya perbaikan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Sumbawa perlu diarahkan pada penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta modernisasi sarana dan prasarana pengujian. Selain itu, sinergi antara Dinas Perhubungan, aparat penegak hukum, dan masyarakat pengguna jasa transportasi juga menjadi faktor penting dalam mewujudkan sistem transportasi yang aman dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor jenis angkutan umum di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan untuk menjamin keselamatan serta kelayakan operasional kendaraan angkutan umum. Namun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan pengujian tersebut masih menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi tingkat efektivitasnya. Keterbatasan sarana dan prasarana pengujian, jumlah dan kompetensi sumber daya manusia penguji yang belum optimal, serta rendahnya tingkat kepatuhan sebagian pemilik kendaraan terhadap kewajiban uji berkala menjadi faktor utama yang mempengaruhi pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor. Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor melalui modernisasi peralatan pengujian, peningkatan kapasitas dan profesionalisme petugas penguji, serta penguatan sosialisasi dan pengawasan terhadap pemilik kendaraan angkutan umum. Dengan demikian, pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Sumbawa diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan keselamatan lalu lintas dan pelayanan publik di bidang transportasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jakarta: Kementerian Perhubungan.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*. Jakarta: Kementerian Perhubungan.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sinambela, L. P. (2018). *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.